

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke III*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Mariam Darus Dadruzaman, *KUHperdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.

Salim.HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPperdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta. 2000

Taufik Hidayat, *Regulasi, Keselamatan dan Pelayanan Perkeretaapian Indonesia*, Indonesian Railway Watch, Bandung, 2011.

Taufik Hidayat, *Jalan Panjang Menuju Kebangkitan Perkeretaapian Indonesia*, Edisi Revisi Tahun 2012, Indonesian Railway Watch, Bandung, 2012.

Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, Universitas Andalas, Padang, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara beserta peraturan – peraturan yang terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian ,Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana, Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2001 tentang Angkutan Kereta Api.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2003 tentang Pengoperasian Kereta Api.

Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KA. 407/ SK. 162/DJKA/4/14 tentang Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 2014.



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi

C. Jurnal / Makalah

R.Kartika Sari, SH.,M.H, *Laporan Penelitian (Penerapan Public Service Obligation (PSO) Pada BUMN Guna Meningkatkan Peran BUMN Sebagai Pelaku Usaha Yang Kompetitif Dalam Pembangunan Ekonomi,* Fakultas Hukum UNPAJ, Bandung

D.Situs Internet

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193>, Public Service Obligation, 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_ekonomi.

Peneliti Madya dan Kebijakan Badan Fiskal,Depkeu,2008,Problematika pelaksanaan Public Service Obligation,

<http://beritatrans.com/2014/05/12/penetapan-gapeka-mulai-1-juni-2014/#sthash.sCVUK5IE.dpuf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_komuter

